

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH PADA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM (KSDA) RIAU**

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

PURNAMA

165310948

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : PURNAMA
NPM : 165310948
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (KSDA) RIAU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 28 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 April 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Analisis Penerapan akuntansi Keuangan Daerah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (ksda) Riau

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 2021

Yang memberikan pernyataan,



Purnama
NPM: 165310948

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan akuntansi keuangan daerah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau. Jenis dan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi atau memfotocopy data keuangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan serta menggambarkan secara nyata mengenai penerapan akuntansi keuangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau belum sepenuhnya mengacu pada prinsip Akuntansi Berterima Umum yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau tidak membuat jurnal umum serta tidak membuat jurnal finansial dan jurnal anggaran. Sehingga perlu disempurnakan agar Penerapan Akuntansi Pemerintah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau dapat dilaksanakan dan dievaluasi sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci :Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum

ABSTRACT

This study aims to determine the level of suitability of the application of regional financial accounting at the Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (ksda) riau with General Acceptable Accounting Principles.

This research was conducted at the Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (ksda) riau. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are interview and documentation or photocopying financial data of the Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (ksda) riau.

The result of this study indicate that the application of accounting at the Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (ksda) riau. Has not fully referred to the General Acceptable Accounting Principles, namely the Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (ksda) riau does not make general journals, does not keep financial journal and budget journal. So it needs to be refined so that the implementation of Government Accounting at the Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (ksda) riau can be implemented and evaluated in accordance with the General Accepted Accounting Principles.

Keywords: *Generally Accepted Accounting Principles*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan jasmani maupun rohani serta kemudahan disaat kesulitan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau”.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, namun demikian usaha yang maksimal telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut memberikan dorongan dan aturan dalam rangka penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Ahmad Juti dan Ibunda Hj. Syamsimar yang selalu memberikan kasih sayang serta doa yang tak terhingga kepada penulis. Tiada kata yang bisa terucap untuk membalas semua jerih payah ayah dan bunda. Terima kasih banyak atas fasilitas yang ayah dan bunda berikan baik berupa moral maupun material kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.

3. Bapak Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Abrar, Dr., SE., M.Si.,Ak., CA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, saran-saran, nasehat, kesabaran, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan Karyawan/i Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan pelayanan yang baik mulai dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan dan Karyawan/I Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk abang-abang dan kakak-kakak (Mariati, Ermiami, Efendi, Rohima, Mirna wati, dan Asroh, Ardian Chandra ST) yang selalu mendoakan serta memberi semangat kepada penulis.
9. Terimakasih penulis ucapkan kepada Abang Jefry Roki Nanda Saputra S.pd yang selalu mensupport, motivasi, dan doa serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan tak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat (Fadilla Agustina F.Y, Ika Yulianti, Dwinda Afriliyani, Yunita Fuji Lestari, Putri Jelita, Krisdayanti, Mastri Listriyani) yang telah memberikan support, motivasi dan menghibur penulis selama masa perkuliahan, teman-teman

Accounting H dan teman-teman seangkatan 2016 yang telah sama-sama berjuang di Prodi Akuntansi.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan, maka penulis mohon maaf kepada pembaca. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini, agar dikemudian hari Skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu yang berharga dan bermanfaat untuk kedepannya.

Pekanbaru, januari 2021

Penulis

Purnama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Pengertian analisis	10
2.1.2 Pengertian Akuntansi	11
2.1.3 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	12
2.1.4 Pengertian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam	13
2.1.5 Tujuan Akuntansi Daerah	14

2.1.6	Sistem Pencacatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah	15
2.1.7	Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Akuntansi....	17
2.1.8	Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah	18
2.1.9	Siklus Akuntansi Keuangan Daerah	19
2.1.10	Karakteristik Akuntansi Keuangan Daerah.....	23
2.1.11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Thn 2005....	23
2.1.12	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	24
2.1.13	Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.....	25
2.1.14	Penelitian Terdahulu	27
2.2	Hipotesis	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....		
3.1	Lokasi Penelitian.....	29
3.2	Jenis dan Sumber data.....	29
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Sejarah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.....	31
4.1.1	Visi dan Misi.....	33
4.1.2	Tugas Pokok san Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	34
4.1.3	Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau	36

4.2 Hasil Penelitian	39
4.2.1 Analisis Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Balai Besar KSDARiau	39
4.2.1.1 Sistem Penerimaan Kas.....	39
4.2.1.2 Sistem Pengeluaran Kas.....	41
4.2.2 Analisis Penerapan Akuntansi pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	43
4.2.3 Proses Akuntansi.....	43
4.2.4 Penyajian Laporan Keuangan	58
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN DATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Buku Kas Umum	45
Tabel 4.2 Jurnal Umum.....	46
Tabel 4.3 Jurnal finansial dan jurnal anggaran	47
Tabel 4.4 Buku Besar Belanja Gaji Pokok PNS	53
Tabel 4.5 Buku Besar Belanja Pembulatan Gaji PNS	53
Tabel 4.6 Buku Besar Belanja Tunj. Suami Istri PNS	53
Tabel 4.7 Buku Besar Belanja Tunj. Anak PNS	53
Tabel 4.8 Buku Besar Belanja Tunj. Struktural PNS.....	53
Tabel 4.9 Buku Besar Belanja Tunj. Fungsional PNS	54
Tabel 4.10 Buku Besar Belanja Tunj.PPh PNS	55
Tabel 4.11 Buku Besar Belanja Tunj.Beras PNS.....	55
Tabel 4.12 Buku Besar Belanja Tunj. Umum PNS	55
Tabel 4.13 Buku Besar Belanja Perjalanan Biasa.....	55
Tabel 4.14 Buku Besar Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	55
Tabel 4.15 Buku Besar Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau.....	36
Gambar 4.2 Bagan Penerimaan Kas	40
Gambar 4.3 Bagan Pengeluaran Kas.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 neraca tahun 2017 dan 2018.....	75
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 dan 2018.....	78
Lampiran 3 Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2017 dan 2018	81
Lampiran 4 Daftar Aset tahun 2017 dan 2018.....	83
Lampiran 5 Daftar Persediaan tahun 2017 dan 2018.....	101
Lampiran 6 Izin Operasional/Akte Pendirian	114
Lampiran 7 Foto Dokumentasi	118
Lampiran 8 Buku Besar tahun 2017 dan 2018.....	121
Lampiran 9 Struktur Organisasi.....	225
Lampiran 10 Neraca Percobaan tahun 2017 dan 2018	230
Lampiran 11 Jurnal penyesuaian tahun 2017 dan 2018.....	237
Lampiran 12 Buku Kas Umum tahun 2017 dan 2018	242

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah suatu sistem yang menyediakan laporan untuk para pengguna informasi mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan guna untuk mengambil sebuah keputusan. Akuntansi secara umum terbagi menjadi dua yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencacatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Sedangkan akuntansi bisnis adalah memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam suatu periode tertentu.

Persamaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis adalah sama-sama memberikan informasi atau posisi keuangan dari hasil operasi, mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum, sama-sama mengembangkan prinsip dan standar akuntansi, dan menggunakan sistem bagan perkiraan standar. Sedangkan perbedaannya adalah akuntansi pemerintahan tidak memiliki laporan laba/rugi sebagai laporan keuangan, tetapi tetap ada laporan hasil operasi pada suatu periode tertentu, akuntansi pemerintahan terdapat perkiraan anggaran sehingga ada jurnal untuk anggaran yang telah disetujui, pengeluaran modal dilaporkan baik dalam laporan neraca, maupun laporan

operasional, dan dalam akuntansi pemeritahan perkiraan “modal” diganti dengan “saldo dana”.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak setelah reformasi. Dimana akuntansi keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan utama dalam pemerintah, karena akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan serta perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan. Awalnya, dengan diberlaku nya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2004 diterbitkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu suatu konsep pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen, yaitu akuntabilitas, transparansi,serta partisipasi,. Pertama, akuntabilitas adalah bentuk kewajibanpemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijakan serta tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Ketiga, partisipasi artinya semua masyarakat mempunyai hak suara untuk pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang bisa mewakili kepentingan mereka.

Tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang Undang dan peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam system pemerintah Daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan keuangan SKPD merupakan sumber dalam penyusunan laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Informasi akuntansi yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada segi kegiatan dan tujuan dari perusahaan atau lembaga

tersebut. Perusahaan dalam kegiatan operasionalnya lebih memprioritaskan pada pencapaian keuntungan usaha semaksimal mungkin (*profit oriented*) sedangkan pada instansi pemerintahan melayani dan mengutamakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perbedaan diatas maka bentuk dan penyusunan laporan keuangannya pun harus disusun sesuai dengan tujuan awal dari tiap-tiap perusahaan tersebut. Meskipun tujuan utama pemerintah dan perusahaan berbeda, pada prinsipnya tujuan akuntansi dari keduanya adalah sama, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam suatu periode akuntansi untuk para pengguna informasi.

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencacatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer yang dalam penyelenggaraan akuntansinya mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, yang disusun berdasarkan pedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan (Halim, 2012:83). Sistem akuntansi diatas dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi yang ada di dalam sistem akuntansi.

Siklus akuntansi dapat diartikan sebagai langkah-langkah tertentu untuk menghasilkan suatu laporan keuangan dan setelah langkah-langkah tersebut selesai maka semua kegiatan yang ada dalam langkah tersebut akan terus berulang

kembali sesuai dengan urutannya. Adapun langkah-langkah yang ada dalam siklus akuntansi keuangan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang pertama yang dilakukan dalam proses pelaksanaan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SKPD adalah mencatat setiap transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dicatat dalam Buku Kas Umum. Yang mana Buku Kas Umum tersebut dipegang oleh Bendahara Sub Bagian Umum (SUBAG).

Kemudian tahap selanjutnya yang seharusnya dilakukan yaitu penjurnalan, tetapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tidak membuat jurnal umum dan tidak membuat jurnal finansial dan jurnal anggaran. Selanjutnya transaksi yang telah dijurnal akan diposting ke buku besar. Buku besar yang dibuat oleh Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Riau bersumber dari Transaksi SPM dari KPPN atau Buku Kas Umum oleh Bendahara. Buku besar pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dibuat per tanggal. Setelah itu dibuat Neraca Saldo. Neraca saldo yang dilakukan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dilakukan per tahun atau per satu periode akuntansi.

Tahap selanjutnya setelah dibuat neraca saldo akan dilakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian pada Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Riau dibuat per tanggal (lampiran 10). Kemudian disajikan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Dalam penyusunan LRA (Lampiran 2) pada Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Riau mencakup unsur-unsur sebagai berikut: pendapatan yang terdiri atas Penerimaan Negara bukan Pajak. Belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Laporan Posisi keuangan (Neraca) merupakan bagian dari sebuah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam penyusunan neraca (Lampiran 1) pada Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Riau mencakup unsur-unsur yang terdiri dari aset lancar yang terdiri atas Belanja dibayar dimuka, piutang bukan pajak, penyisihan piutang tak tertagih, dan persediaan. Sedangkan aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, aset Tetap Lainnya, Akumulasi penyusutan aset tetap. Untuk penyusutan aset tetap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menggunakan metode garis lurus. Kemudian aset lainnya yang terdiri atas aset tidak berwujud, aset lain-lain, akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya. Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek (utang kepada pihak ketiga). Ekuitas terdiri dari ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (Lampiran 3), pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menyediakan informasi mengenai kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas mencakup unsur-unsur yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, selisih revaluasi asset tetap, koreksi nilai asset tetap non revaluasi.

Selanjutnya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. Catatan atas laporan keuangan juga berisi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah yang penulis temukan disini yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tidak membuat jurnal umum serta tidak membuat jurnal finansial dan jurnal anggaran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi keuangan Daerah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan daerah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya dibidang akuntansi secara umum dan bidang akuntansi keuangan daerah secara khusus, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi keuangan daerah yang diterapkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.
- b. Bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau penelitian ini merupakan masukan atau saran yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi terhadap penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama pada tempat yang berbeda.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi, jenis dan sumber data, serta teknik data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan dan dianggap penting serta diharapkan berguna bagi perusahaan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Analisis

Menurut Satori (2014) analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

Sugiyono (2015) mengatakan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama diklasifikasikan berbeda.

Menurut Spradley (2015) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Jadi analisis merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Menurut Asrizal (2018) defenisi akuntansi yaitu :

Suatu kegiatan jasa yaitu pencacatan, pengelolaan dan peringkasan transaksi yang berfungsi menyediakadata terutama yang mempunyai sifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

Menurut Dianto (2014:3) akuntansi adalah suatu sistem yang memberikan lapran keuangan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu satu kesatuan ekonomi.

Menurut Sasongko (2016:2-4) menyatakan:

Akuntansi adalah proses/aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan peggunganya. Dan proses akuntansi merupakan sebuah system yang mengukur kegiatan bisnis perusahaan. Proses akuntansi akan terus berulang mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan menurut Halim (2014) :

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem mengolah input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. .

Dengan demikian, selain untuk mengidentifikasi dan mencatat peristiwa ekonomi dan bisnis yang terjadi, akuntansi juga dapat digunakan untuk

mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat untuk dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan dan pihak yang berkepentingan lainnya, seperti kreditur, pemegang saham, atau pemiliknya.

Akuntansi juga berguna untuk menyajikan informasi yang berupa data keuangan perusahaan secara kuantitatif dan relevan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Baik dalam mengukur keberhasilan operasional perusahaan maupun membuat rencana dimasa yang akan datang.

2.1.3 Pengertian akuntansi keuangan daerah

Pada prinsipnya pengertian keuangan negara sama dengan keuangan daerah, perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah adalah keuangan negara meliputi aspek kekayaan negara, sedangkan keuangan daerah hanya meliputi pengelolaan keuangan suatu daerah tertentu saja. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah.

Menurut Halim (2012:40) Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencacatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kotan dan propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau propinsi) yang memerlukan. Pihak pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasil oleh akuntansi keuangan daerah antara lain: DPRD (Dewan Perwakilan Daerah), BPK (Badan Pengawas Keuangan), inpektor, kreditor,

donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah, rakyat, pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa: keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari beberapa defenisi di atas ada dua hal yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

2.1.4 Pengertian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau yang sering disingkat dengan BBKSDA adalah suatu instansi yang berada di bawah naungan

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memiliki dua wilayah kerja, yaitu berada di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memiliki sebuah organisasi, yang mana dalam organisasi tersebut memiliki banyak subbagian yang berperan penting pada instansi BBKSDA diantaranya Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan, Kehumasan. Pada Bagian Data, Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintah.

2.1.5 Tujuan Akuntansi Daerah

Tujuan akuntansi keuangan daerah adalah:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayai kepada organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah dan pengguna dan penggunaan serta publik.

2.1.6 Sistem Pencacatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem pencacatan

Menurut Erlina (2015:4-5) ada tiga sistem pencacatan yang dapat digunakan yaitu :

1) *Single Entry*

Sistem pencacatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem pencacatan tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencacatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum (BKU).

2) *Double Entry*

Sistem pencacatan *double entry* juga sering disebut dengan tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Artinya setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, satu di sisi debit dan satu lagi di sisi kredit. Setiap pencacatan harus menjaga keseimbangan antara kedua sisi tersebut dari persamaan dasar akuntansi. Pencacatan dengan sistem *double entry* ini sering disebut dengan istilah menjurnal.

3) *Triple Entry*

Sistem pencacatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencacatan dengan menggunakan sistem pencacatan *double entry*, ditambah dengan

pencacatan pada buku anggaran. Dengan adanya pencacatan *triple entry* ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

b. Dasar Pengakuan

Dasar pengakuan (*recognition*) merupakan penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan transaksi dicatat digunakan berbagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Menurut Halim (2012:5-55) dasar pengakuan akuntansi terbagi menjadi 4 yaitu :

1) Dasar Kas (*cash basis*)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan / pencacatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, apabila suatu transaksi bukan menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2) Dasar Akrua (*accrual basis*)

Dasar akrual merupakan dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh sebab itu, transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3) Dasar Kas Modifikasian (*modified cash basis*)

Dasar akuntansi ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan dasar akrual.

4) Dasar AkruaI Modifikasi (*modified accrual basis*)

Dasar ini mencatat transaksi dengan menggunakan dasar kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan dasar akruaI untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akruaI dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

2.1.7 **Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Akuntansi**

Akuntansi terdiri dari tiga bidang utama, yaitu akuntansi pemerintah, akuntansi nasional, akuntansi perusahaan. Akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi nasional atau akuntansi sosial adalah akuntansi sosial atau biasa disebut akuntansi makro yang merupakan akuntansi yang khusus ditetapkan oleh lembaga dalam arti makro akuntansi. Sebagai contoh beraca pembayaran Negara, transaksi arus dana, transaksi pendapatan dan produksi nasional, serta neraca nasional. Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi komersial. Akuntansi perusahaan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Secara rinci akuntansi perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen lebih menunjukkan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengelola perusahaan. Dalam akuntansi perusahaan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak pemilik modal, manajemen,

kreditor, penanam modal, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah:

1. Akuntansi pemerintahan pusat
2. Akuntansi pemerintah daerah, terdiri dari : akuntansi pemerintahan provinsi, akuntansi pemerintahan kabupaten/kota.

2.1.8 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2012:40) mengatakan bahwa :

Seluruh informasi dan data-data yang disusun dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal, yaitu pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang biasanya disebut dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi :

- 1) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD merupakan badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

- 2) BPK (Badan Pengawas Keuangan)

BPK adalah badan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya : Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- 3) Investor, Kreditor, dan Donatur.

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya di dalam negeri ataupun diluar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

4) Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti : lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

5) Rakyat

Rakyat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk atau jasa pemerintah daerah.

6) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

7) Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota)

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.9 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi mempunyai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut dimulai dari pencacatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang

dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Proses inilah yang disebut dengan siklus akuntansi.

Menurut Rudianto (2012:16) siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan.

Adapun siklus atau tahapan akuntansi meliputi :

a) Transaksi

Langkah pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi adalah menganalisis bukti transaksi dan kejadian tertentu lainnya dalam perusahaan. Transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi dikatakan benar atau sah jika didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b) Mencatat Transaksi dalam Jurnal

Setelah mendokumentasikan bukti transaksi, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi dalam jurnal. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan atau non keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan.

Defenisi jurnal menurut Mulyadi (2013:4) :

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

Ada 2 macam bentuk jurnal, yaitu :

- 1) Jurnal Umum, digunakan untuk mencatat segala macam transaksi dan kejadian.

- 2) Jurnal Khusus, hanya digunakan untuk transaksi yang bersifat khusus, misalnya jurnal untuk mencatat penerimaan uang, mencatat pengeluaran uang, mencatat pembelian secara kredit, dan lain sebagainya.

c) Posting Buku Besar

Posting merupakan proses pemindahan informasi, minimal berupa tanggal transaksi dan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar yang berkaitan untuk masing-masing ayat jurnal. Jumlah rupiah dalam akun yang dijurnal atau dicatat di buku jurnal diposisi debit, maka ketika dipindahkan ke buku besar jumlah rupiah tersebut diletakkan dikolom debit juga sebesar angka yang sama.

Menurut Halim (2012:68) buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan rekening. Buku besar bertujuan untuk mencatat secara terpisah atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, hutang, dan ekuitas dana.

d) Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Setelah membuat buku besar maka tahap selanjutnya dalam penyelesaian siklus akuntansi adalah membuat neraca saldo.

Menurut Sofyan (2011:24) neraca saldo adalah: neraca yang memuat semua perkiraan, tetapi yang dimaksudkan neraca saldo akhir saja.

Menurut Sofyan (2011:24) manfaat dari neraca saldo sebelum penyesuaian adalah sebagai berikut :

- 1) Mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan karena kita tidak harus membolak-balik buku besar.

- 2) Menguji apakah pencacatan kedalam seluruh rekening sudah benar debit maupun kreditnya.
- 3) Mengetahui saldo pos-pos laporan keuangan dalam satu halaman sehingga dapat dipelajari hubungan antara pos yang satu dan yang lainnya secara mudah (berguna untuk melakukan penyesuaian).

e) Ayat Jurnal Peyesuaian

Penyesuaian berarti pencacatan atau pengakuan data-data transaksi tertentu pada akhir periode sehingga jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap rekening menjadi sesuai dengan kenyataan pada akhir periode tersebut dan laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya pada tanggal laporan neraca.

f) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian / Neraca Lajur

Setelah pembuatan jurnal penyesuaian selesai, maka tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dengan cara mencari saldo-saldo rekening-rekening buku besar setelah posting jurnal penyesuaian dilakukan. Setelah penyesuaian neraca saldo, maka proses selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Namun kadang kala muncul kesulitan saat akan melakukan penyusunan laporan keuangan sehingga akuntansi menyediakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang dikenal dengan sebutan neraca lajur atau kertas kerja.

g) Penyusunan Laporan keuangan

Setelah pencacatan transaksi dan diikhtisarkan, maka disiapkan laporan bagi pemakai. Laporan keuangan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian itu

dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan harus dibuat dengan jujur dan wajar.

2.1.10 Karakteristik Akuntansi Keuangan Daerah

Karakteristik khusus dari akuntansi keuangan daerah adalah menggunakan istilah fund (dana), sehingga akuntansi ini sering disebut dengan akuntansi dana. Sistem akuntansi keuangan daerah direncanakan, diorganisasikan dan dijalankan atas dasar dana.

Pengertian dalam keuangan daerah atau pemerintah adalah satuan akuntansi fiskal dan seperangkat buku besar yang mencatat kas, dan sumber-sumber keuangan lain beserta segala kewajiban-kewajiban yang berkaitan dan sisa modal atau saldo-saldo perubahannya yang dipisahkan dengan maksud melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan tertentu. Akuntansi keuangan daerah secara umum melayani dua tujuan yaitu akuntabilitas dan informasi untuk manajemen.

2.1.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,

penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan untuk tujuan umum laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar akuntansi pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menetapkan dasar kas (*cash basis*) untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dasar akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa lainnya diatur dalam standar akuntansi yang lain.

2.1.12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Akuntansi adalah proses indentifikasi, pencacatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, dan merupakan acuan bagi komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu

masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Sedangkan berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

2.1.13 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu :

a. Basis Akuntansi

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk Neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja

diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat terjadinya atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan (*double entry system*) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu : $\text{asset} = \text{liabilitas} + \text{modal pemilik}$. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebetkan suatu perkiraan dan mengkreditkan perkiraan yang lain.

SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Sama halnya dengan SAPP, SAPD juga terdiri dua subsistem, yaitu :

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD, yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemda, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencacatan investasi, dan utang jangka panjang.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi

yang terjadi dilingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Dalam konstruksi keuangan Negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

2.1.14 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis penerapan akuntansi keuangan daerah yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Fauziah, 2014	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2	Agusta Yolanda, 2016	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah	Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Rokan Hulu

		(BKD) di Kabupaten Rokan Hulu	belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
3	Eli Roza, 2017	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu	Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.2 HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

“Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yaitu berupa wawancara kepada responden terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan daerah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan mendukung seperti kumpulan buku-buku, laporan realisasi anggaran, dan sejumlah data yang tersedia terkait dengan penerapan akuntansi keuangan daerah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang atau tanya jawab langsung yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan orang yang mempunyai informasi dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang permasalahan yang akan diteliti guna memperoleh informasi yang akurat terkait data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang terkait dengan akuntansi keuangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menggambarkan secara nyata mengenai penerapan akuntansi keuangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Analisis data dilakukan dengan membandingkan metode penerapan akuntansi keuangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Kemudian ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 429/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Juli 1978 merupakan tonggak awal sejarah terbentuknya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Yang mana nama Organisasi pada saat itu Sub Balai perlindungan dan pelestarian Alam Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam I Sumatera Utara yang berkedudukan di medan.

Pada tanggal 1 April 1969, Sdr. Junjung Mudjizat Sudarma yang saat itu sebagai Kepala Seksi PPA yang dibantu beberapa orang staf, pada tahun 1978 beliau ditugaskan di Bogor dan kedudukannya digantikan Sdr. Ir. Soemarsono Hardjodiwiryo Msc., sebagai Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, Pada tahun 1979 beliau digantikan oleh Ir. R. Soemarsono dan Ir. Suyono, pada tahun 1980 Kepala Sub Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ruslan Effendy, pada tahun 1990 Kepala Sub Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau oleh Marpurwasuka, pada tahun 1994 Kepala Sub Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Sammuel Pangabean dan pada tahun 1995 Kepala Sub Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Susilo Legowo kemudian pada tahun 1999 digantikan oleh Ir. Djati Wicaksono Hadi, M.Si. pada tahun yang sama Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau berganti nama menjadi Unit

Konservasi Sumber Daya Alam Riau, pada tahun 2001 digantikan oleh Ir. Jhon Kenedie, M.M.

Pada tahun 2002, oleh karena wilayah kerja serta bertambahnya Tugas Pokok dan Fungsi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 juni 2002 Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau dinaikkan eselonnya menjadi eselon IIIa dengan nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan pada tanggal 15 juli 2005 jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Dr. Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc. Pada tanggal 13 Oktober 2006 digantikan oleh Ir. A. Rachman Sidik, Ed.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 tanggal 1 februari 2007 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B dengan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan masih dengan Kepala Balai Ir. A. Rachman Sidik, Ed. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 8/Menlhk/ Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam ditetapkan sebagai Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B namun sudah tidak terdapat Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan akan tetapi telah menjadi Seksi konservasi Wilayah IV dengan wilayah Dumai/Kab & Kota, Rokan Hilir dan Siak. Sedangkan Seksi Konservasi Wilayah III Duri/Kab & Kota, Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu dan Pekanbaru.

Seiringan dengan berkembangnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah terjadi pergantian-pergantian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, yaitu sebagai berikut :

1. Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed. (Agustus 2007-Juni 2009)
2. Drs. Trisnu Danisworo, MS (Juni 2009-Oktober 2010)
3. Ir. A. Kurnia Rauf (Oktober 2010-Januari 2012)
4. Ir. Bambang dahoro Aji, MM.,M.Si (Januari 2012-Agustus 2012)
5. Ir. Ahmad Saerozi (Agustus 2012-Juli 2013)
6. Ir. Kemal Amas, M.Sc (Juli 2013-Maret 2016)
7. Ir. Tandy Tjahjana, M.Si (Maret 2016-Agustus 2016)
8. Ir. Mahfudz, M.P (Agustus 2016-Agustus 2017)
9. Suharyono, S.H.,M.Si.,M.Hum (Desember 2017-Sekarang)

4.1.1 VISI DAN MISI

1. VISI

Visi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam rangka pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, adalah : “
Optimalisasi Peran dan Fungsi Balai Besar KSDA Riau Melalui Penguatan Kelembagaan Demi Terciptanya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Mantap”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjalankan misi sebagai berikut :

- a. Pemantapan status dan fungsi kawasan konservasi

- b. Pemantapan perlindungan dan pengawetan potensi SDAHE kawasan konservasi.
- c. Pengembangan pemanfaatan SDAHE kawasan konservasi sesuai dengan prinsip konservasi.
- d. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor **P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016** tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Tugas Pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, meliputi :

- 1) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- 2) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, meliputi :

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.

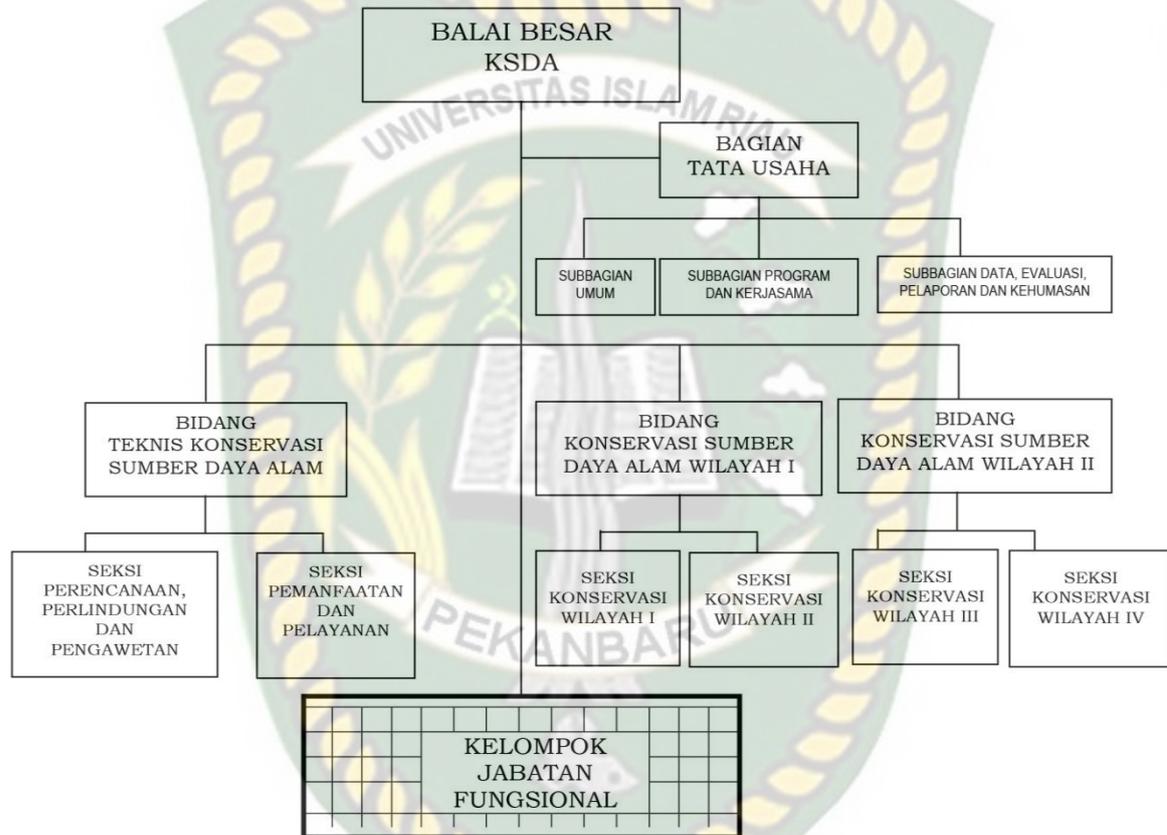
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional.
- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
- h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

4.1.3 Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merupakan organisasi Balai Besar dengan tipe B yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan dibantu oleh empat pejabat struktural eselon III dan sembilan pejabat struktural eselon IV. Adapun struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagaimana pada Gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau



Keterangan :

a. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerjasama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan serta kehumasan yang dibantu oleh sub bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program dan Kerjasama serta Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan yang berkedudukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru.

a) Sub Bagian Umum

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

b) Sub Bagian Program dan Kerjasama

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta kerja sama.

c) Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan serta kehumasan.

b. Kepala Bidang Teknis KSDA

Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, menyiapkan bahan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam hal ini dibantu oleh Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan serta Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan yang berkedudukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru.

c. Kepala Bidang Konservasi Wilayah

Kepala Bidang Konservasi Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri dari Bidang Konservasi Wilayah I Rengat yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu Seksi Konservasi Wilayah I Pangkalan Kerinci dan Seksi Konservasi Wilayah II Batam. Sedangkan Bidang Konservasi Wilayah II berkedudukan di Siak dengan membawahi 2 (dua) Seksi Wilayah yaitu

Seksi Konservasi Wilayah III di Duri dan Seksi Konservasi Wilayah IV yang berkedudukan di Dumai.

4.2 Hasil Penelitian

Sehubungan dengan uraian teoritis dan data yang diperoleh yang telah disajikan sebelumnya, maka bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membahas tentang Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau.

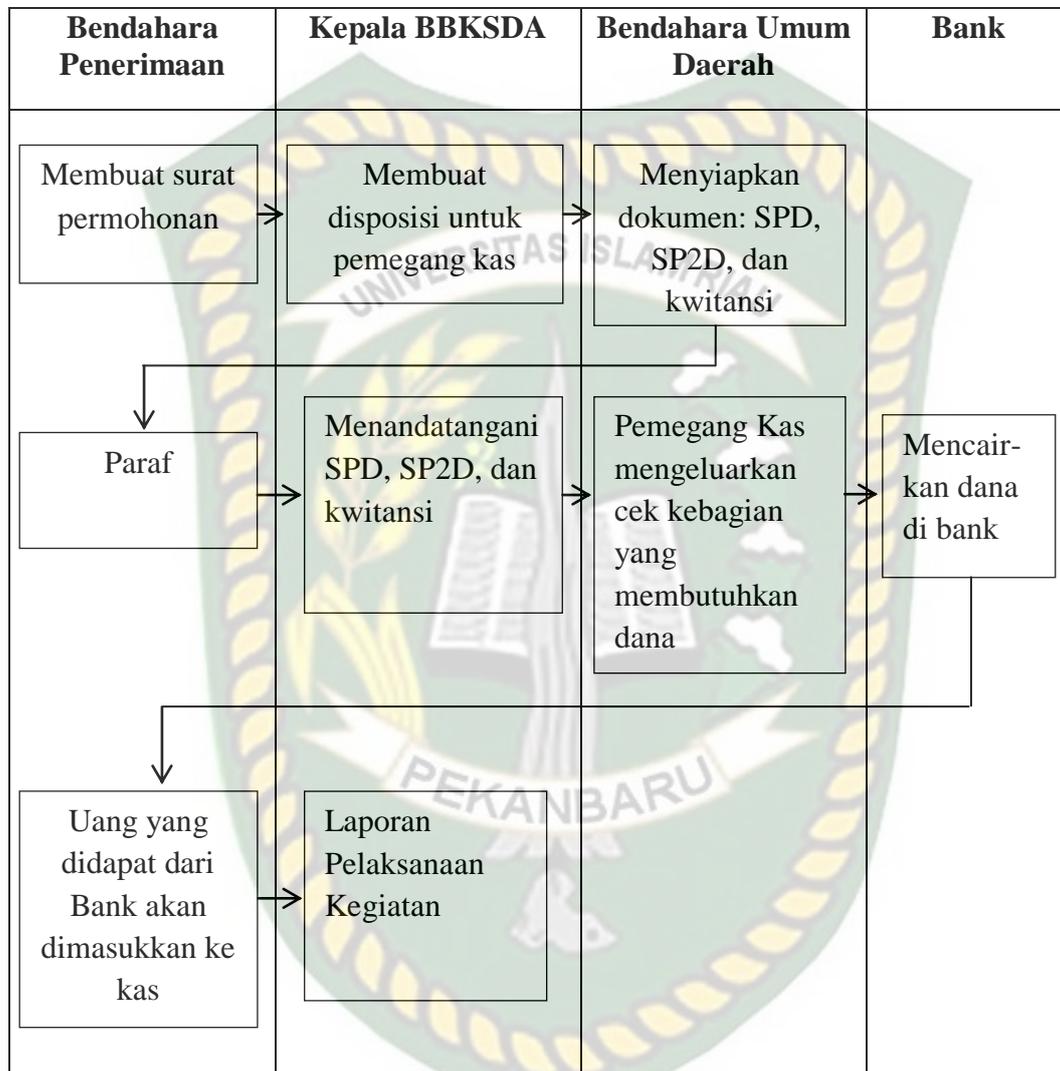
4.2.1 Analisis Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya (KSDA) Riau.

4.2.1.1 Sistem Penerimaan kas

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau pada bagian Bendahara Pengeluaran harus membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kepala Balai Besar selaku pengguna anggaran, kemudian Kepala Balai Besar membuat disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah akan mengeluarkan Surat Permohonan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kwitansi, perincian dan kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala BBKSDA, Bendahara Umum Daerah akan menyerahkan cek kepada bagian yang membutuhkan dana. Cek yang telah diserahkan tersebut akan dicairkan ke Bank, uang yang didapatkan akan dimasukkan ke kas.

Berikut ini bagan Penerimaan Kas pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau :

Gambar 4.2
Bagan Penerimaan Kas
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau



Sumber: Data yang diolah Penulis

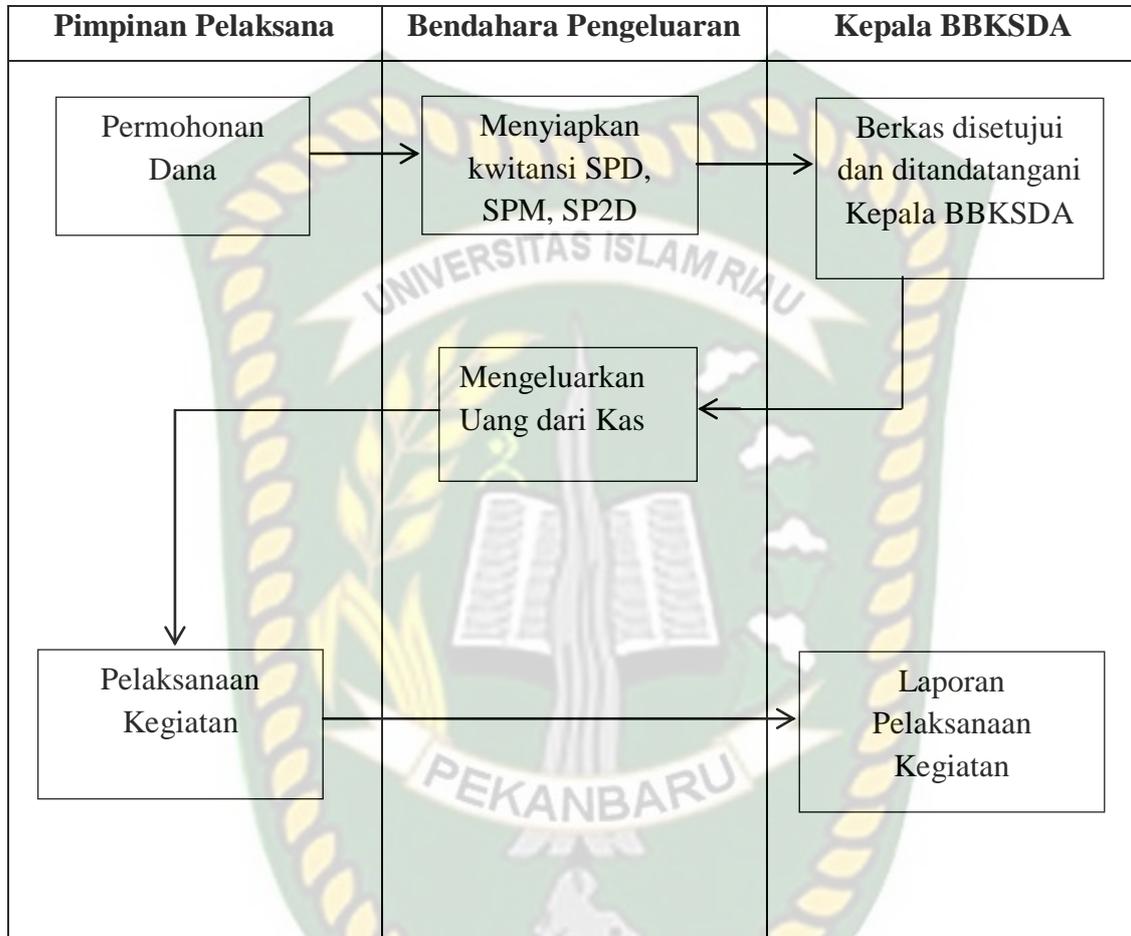
Dari bagan Penerimaan kas diatas disimpulkan bahwa sistem Penerimaan Kas yang dijalankan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau untuk memudahkan pengawasan dana yang diterima oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau serta memudahkan pencacatan atas penerimaan kas yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

4.2.1.2 Sistem Pengeluaran Kas

Proses pengeluaran kas pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dimulai dengan mengajukan permohonan dana oleh Pimpinan pelaksana, atasan Bendahara pengeluaran memberi persetujuan pembayaran yang dilakukan pimpinan pelaksana. Pemegang kas akan menyiapkan kwitansi atas semua transaksi pengeluaran dan mengeluarkan uang dari kas. Kemudian dibukukan dan dibuat dokumen seperti SPD, SPM, dan SP2D yang dijadikan sebagai bukti setiap pengeluaran. Dokumen yang telah dibuat akan diperiksa dan ditandatangani oleh atasan Pemegang Kas atau Kepala BBKSDA.

Berikut ini bagan Pengeluaran Kas pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau :

Gambar 4.3
Bagan Penerimaan Kas
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau



Sumber: Data yang diolah Penulis

Dari bagan Pengeluaran kas diatas disimpulkan bahwa sistem Pengeluaran Kas yang dijalankan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau untuk memudahkan pengawasan dana yang diterima oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau serta memudahkan pencacatan atas Pengeluaran Kas yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

4.2.2 Analisis Penerapan Akuntansi pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Riau

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyusunan laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan yaitu (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah), belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer), dan pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan) dalam hal anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas (*cash basic*). Sedangkan basis akrual (*accrual basic*) untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.2.3 Proses Akuntansi

Tahap pencatatan, merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Pada tahap ini yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dimulai dari mencatat bukti-bukti transaksi ke dalam Buku Kas Umum. Yang mana dalam Buku Kas Umum terdapat kolom tanggal, nomor bukti, uraian, penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi.

Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau setiap transaksi yang terjadi hanya dicatat dalam Buku Kas Umum. Hal ini dapat dilihat pada transaksi berikut :

01-11-2018 : Diterima SP2DPL Piutang dari KPPN Nomor
180081504001055, untuk pembayaran sebagai berikut:

- Belanja Gaji pokok PNS Rp 394,565,520
- Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 6,240
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Rp 32,174,070
- Belanja Tunj. Anak PNS Rp 10,908,894
- Belanja Tunj. Struktural PNS Rp 10,805,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS Rp 23,940,000
- Belanja Tunj. PPh PNS Rp 46,307
- Belanja Tunj. Beras PNS Rp 29,981,880
- Belanja Tunjangan Umum PNS Rp 12,905,000

- 05-11-2018 : Diterima SP2DPL Piutang dari KPPN Nomor 180081303014464 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Biasa Sebesar Rp 15,000,000 .
- 28-11-2018 : Diterima SP2DPL piutang dari KPPN Nomor 180081303015697 untuk pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp 2,100,000.
- 29-11-2018 : Diterima SP2DPL piutang dari KPPN Nomor 180081303015813 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp. 22,200,000.

1. Buku Kas Umum

Dari transaksi-transaksi diatas maka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mencatat ke dalam Buku Kas Umum sebagai berikut :

Tabel 4.1
Buku Kas Umum
November 2018

TGL	No B/K	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
01-11-2018	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	394.565.520
	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	6.240
	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	32.174.070
	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	10.908.894
	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	10.805.000
	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	23.940.000
	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	46.307
	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	29.981.880
	180081504001055/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	12.905.000
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Gaji Pokok PNS	394.565.520	-
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.240	-
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	32.174.070	-
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Tunj. Anak PNS	10.908.894	-
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Tunj. Struktural PNS	10.805.000	-
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Tunj. Fungsional PNS	23.940.000	-
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Tunj. PPh PNS	46.307	-
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Tunj. Beras PNS	29.981.880	-
	180081504001055/SP2DPL	Belanja Tunj. Umum PNS	12.905.000	-
05-11-2018	180081303014464/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	15.000.000
	180081303014464/SP2DPL	Belanja Perjalanan Biasa	15.000.000	-
28-11-2018	180081303015697/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	2.100.000
	180081303015697/SP2DPL	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.100.000	-
29-11-2018	180081303015813/SP2DPL	Piutang dari KPPN	-	22.200.000
	180081303015813/SP2DPL	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.200.000	-

Sumber : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

2. Transaksi di atas dibuat Jurnal

Dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Riau belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum Karena setelah membuat Buku Kas Umum, proses akuntansi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau seharusnya membuat Jurnal Umum dari setiap transaksi agar lebih akurat. Namun pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tidak melakukan pencatatan transaksi tersebut ke Jurnal Umum. Maka Jurnal Umum

yang seharusnya dibuat oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jurnal Umum
November 2018

TGL	URAIAN	REF	JUMLAH	
			DEBET	KREDIT
01-11-2018	Belanja Gaji Pokok PNS		394.565.520	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS		6.240	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		32.174.070	
	Belanja Tunj. Anak PNS		10.908.894	
	Belanja Tunj. Struktural PNS		10.805.000	
	Belanja Tunj. Fungsional PNS		23.940.000	
	Belanja Tunj. PPh PNS		46.307	
	Belanja Tunj. Beras PNS		29.981.880	
	Belanja Tunj. Umum PNS		12.905.000	
	Piutang dari KPPN			394.565.520
	Piutang dari KPPN			6.240
	Piutang dari KPPN			32.174.070
	Piutang dari KPPN			10.908.894
	Piutang dari KPPN			10.805.000
Piutang dari KPPN			23.940.000	
Piutang dari KPPN			46.307	
Piutang dari KPPN			29.981.880	
Piutang dari KPPN			12.905.000	
05-11-2018	Belanja Perjalanan Biasa Piutang dari KPPN		15.000.000	15.000.000
28-11-2018	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Piutang dari KPPN		2.100.000	2.100.000
29-11-2018	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Piutang dari KPPN		22.200.000	22.200.000

Sumber: Data yang diolah Penulis

3. Jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran

Selanjutnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau seharusnya membuat jurnal finansial dan jurnal anggaran tetapi Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau jurnal finansial dan jurnal anggaran tersebut. Berikut ini Tabel Jurnal jurnal finansial dan jurnal anggaran yang seharusnya dibuat oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

Tabel 4.3
Jurnal Umum
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau
November 2018

Tanggal	No Bukti	Uraian	Debit	Kredit
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan (diterima SP2D untuk pembayaran belanja gaji pokok PNS)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja gaji pokok PNS Kas dibendahara pengeluaran SKPD</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja gaji pokok PNS Estimasi perubahan SAL (SP2DPL atas belanja PL Rp 394.565.520)</p>	394.565.520 394.565.520 394.565.520	394.565.520 394.565.520 394.565.520
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan (diterima SP2DPL untuk pembayaran pembulatan gaji PNS)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja pembulatan gaji PNS Kas dibendahara pengeluaran SKPD</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja pembulatan gaji PNS Estimasi perubahan SAL (SP2D atas belanja PL Rp6.240)</p>	6.240 6.240 6.240	6.240 6.240 6.240
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p>	32.174.070	32.174.070

		<p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan</p> <p>(diterima SP2D untuk pembayaran Tunj. Suami/istri PNS)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja Tunj. Suami/istri PNS Kas dibendahara pengeluaran SKPD</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja Tunj. Suami/istri PNS Estimasi perubahan SAL</p> <p>(SP2D atas belanja PL Rp32.174.070)</p>	32.174.070	32.174.070
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan</p> <p>(diterima SP2DPL untuk membayar belanja Tunj. Anak PNS)</p> <p>Jurnal Finansial: belanja Tunj. Anak PNS Kas dibendahara pengeluaran</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja Tunj. Anak PNS Estimasi perubahan SAL</p> <p>(pembayaran Tunj. Anak PNS senilai Rp 10.908.894)</p>	10.908.894	10.908.894
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan</p> <p>(diterima SP2DPL untuk pembayaran Belanja Tunj. Struktural PNS)</p>	10.805.000	10.805.000

		<p>Jurnal Finansial: Belanja Tunj. Struktural PNS Kas dibendahara pengeluaran SKPD</p> <p>10.805.000</p> <p>10.805.000</p>		
		<p>Jurnal Anggaran: Belanja Tunj. Struktural PNS Estimasi perubahan SAL</p> <p>10.805.000</p> <p>10.805.000</p> <p>(SP2D atas belanja PL Rp10.805.000)</p>		
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>23.940.000</p> <p>23.940.000</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan</p> <p>(diterima SP2D untuk pembayaran Tunj. Fungsional PNS)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja Tunj. Fungsional PNS Kas dibendahara pengeluaran SKPD</p> <p>23.940.000</p> <p>23.940.000</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja Tunj. Fungsional PNS Estimasi perubahan SAL</p> <p>23.940.000</p> <p>23.940.000</p> <p>(SP2D atas belanja PL Rp23.940.000)</p>		
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>46.307</p> <p>46.307</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan</p> <p>(diterima SP2D untuk pembayaran Tunj. PPh PNS)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja Tunj. PPh PNS Kas dibendahara pengeluaran SKPD</p> <p>46.307</p> <p>46.307</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja Tunj. PPh PNS Estimasi perubahan SAL</p> <p>46.307</p> <p>46.307</p>		

		(SP2D atas belanja PL Rp 46.307)		
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan (diterima SP2DPL untuk membayar Belanja Tunj. Beras PNS)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja Tunj. Beras PNS Kas dibendahara pengeluaran</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja Tunj. Beras PNS Estimasi perubahan SAL (pembayaran Tunj. Beras PNS senilai Rp 29.981.880)</p>	29.981.880	29.981.880
01 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan (diterima SP2DPL untuk pembayaran Belanja Tunj. Umum PNS)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja Tunj. Umum PNS Kas dibendahara pengeluaran SKPD</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja Tunj. Umum PNS Estimasi perubahan SAL (SP2D atas belanja LS Rp 12.905.000)</p>	12.905.000	12.905.000
0 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan</p>	15.000.000	15.000.000

		<p>(diterima SP2D untuk pembayaran belanja perjalanan dinas)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja perjalanan dinas Kas dibendahara pengeluaran SKPD 15.000.000</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja perjalanan dinas Estimasi perubahan SAL 15.000.000 (SP2D atas belanja LS Rp 15.000.000)</p>	15.000.000	15.000.000
28 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah 2.100.000</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan</p> <p>(diterima SP2D untuk pembayaran belanja pengiriman surat dinas pos pusat)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Kas dibendahara pengeluaran SKPD 2.100.000</p> <p>Jurnal Anggaran: Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Estimasi perubahan SAL 2.100.000 (SP2D atas belanja PL Rp 2.100.000)</p>	2.100.000	2.100.000
29 November 2018		<p>Jurnal Finansial: Kas dibendahara pengeluaran R/K pemerintah daerah 22.200.000</p> <p>Jurnal Anggaran: Tidak ada jurnal karena tidak bagian dari transaksi belanja atau pendapatan</p> <p>(diterima SP2D untuk membayar belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota)</p> <p>Jurnal Finansial: Belanja perjalanan dinas 22.200.000</p>	22.200.000	22.200.000

		paket meeting dalam kota Kas dibendahara pengeluaran Jurnal Anggaran: Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota) Estimasi perubahan SAL (pembayaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota senilai Rp22.200.000)	 22.200.000 22.200.000	22.200.000 22.200.000
--	--	---	--	------------------------------

Sumber: Data yang diolah Penulis

4. Memposting ke Buku Besar

Setelah mencatat semua transaksi pada buku kas umum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau seharusnya membuat Jurnal Umum dan membuat jurnal finansial dan jurnal anggaran seperti yang telah di uraian diatas, tetapi karena pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tidak membuat Jurnal Umum dan jurnal finansial dan jurnal anggaran, maka pada tahap memposting ke Buku Besar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memposting angka transaksi SPM dari KPPN atau Buku Kas Umum yang dibuat oleh bendahara. Misalnya, diterima Piutang dari KPPN untuk pembayaran Belanja Gaji Pegawai PNS sebesar Rp 394.565.520. Maka pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum kemudian memposting ke dalam Buku Besar tanpa melakukan penjurnalan.

Berikut buku besar yang dibuat Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Riau :

Tabel 4.4
Buku Besar Belanja Gaji Pokok PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Gaji Pokok PNS		394.565.520		394.565.520
	Jumlah		394.565.520		394.565.520

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.5
Buku Besar Belanja Pembulatan Gaji PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Pembulatan Gaji PNS		6.240		6.240
	Jumlah		6.240		6.240

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.6
Buku Besar Tunj. Suami/Istri PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		32.174.070		32.174.070
	Jumlah		32.174.070		32.174.070

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.7
Buku Besar Belanja Tunj. Anak PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Tunj. Anak PNS		10.908.894		10.908.894
	Jumlah		10.908.894		10.908.894

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.8
Buku Besar Belanja Tunj. Struktural PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Tunj. Struktural PNS		10.805.000		10.805.000

Jumlah		10.805.000		10.805.000
--------	--	------------	--	------------

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.9
Buku Besar Belanja Tunj. Fungsional PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Tunj. Fungsional PNS		23.940.000		23.940.000
	Jumlah		23.940.000		23.940.000

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.10
Buku Besar Belanja Tunj. PPh PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Tunj. PPh PNS		46.307		46.307
	Jumlah		46.307		46.307

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.11
Buku Besar Belanja Tunj. Beras PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Tunj. Beras PNS		29.981.880		29.981.880
	Jumlah		29.981.880		29.981.880

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.12
Buku Besar Belanja Tunj. Umum PNS
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
01-11-2018	Belanja Tunj. Umum PNS		12.905.000		12.905.000
	Jumlah		12.905.000		12.905.000

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.13
Buku Besar Belanja Perjalanan Biasa
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				

05-11-2018	Belanja Perjalanan Biasa		15.000.000		15.000.000
	Jumlah		15.000.000		15.000.000

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.14
Buku Besar Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
28-11-2018	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		2.100.000		2.100.000
	Jumlah		2.100.000		2.100.000

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

Tabel 4.15
Buku Besar Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
November 2018

TGL	URAIAN	Ref	Debet	Kredit	Saldo
01-11-2018	Saldo Awal				
30-11-2018	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		22.200.000		22.200.000
	Jumlah		22.200.000		22.200.000

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2018

5. Neraca percobaan

Neraca Percobaan merupakan sebuah daftar yang berisikan semua akun pada buku besar. Daftar tersebut berisi daftar akun dan nilainya. Nilai yang disajikan berupa saldo debet dan kredit. Neraca percobaan ini digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan daerah seperti laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas dan laporan keuangan lainnya. Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setelah menyusun neraca percobaan maka akan dilanjutkan dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca (lampiran 1), laporan realisasi anggaran (lampiran 2), laporan perubahan ekuitas (lampiran 3), laporan persediaan (lampiran 4), daftar asset (lampiran 5) dan membuat jurnal penyesuaian (lampiran 11).

6. Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal Penyesuaian dilakukan karena adanya transaksi yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau namun pengeluaran kas belum dilakukan (akrual). Jurnal penyesuaian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Jurnal penyesuaian yang dilakukan pada akun tertentu seperti peralatan dan mesin, beban langganan listrik, beban langganan telepon, serta akun-akun dari transaksi akrual lainnya.

7. Akuntansi Aset Tetap

Asset tetap merupakan kekayaan entitas yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada saat aset tetap diperoleh, ia dicatat sebesar harga pokoknya. Selama masa pemakaian, aset tetap akan mengalami penurunan nilai yang disebut penyusutan/depresiasi (*depreciation*). Beberapa contoh aset tetap adalah peralatan dan mesin, tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Metode-metode yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya biaya penyusutan adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Tetapi metode yang sering digunakan ialah metode garis lurus.

Asset tetap disajikan sebesar harga perolehan aset tetap tersebut dan kemudian dibagi dengan Umur Ekonomis aset tetap tersebut. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap

dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berikut penulis gambarkan pencacatan yang seharusnya dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau :

a. Peralatan dan mesin

Contoh : pada laporan posisi keuangan tahun 2018 diperoleh sebuah peralatan dan mesin dengan harga Rp 18.324.200.451, umur ekonomis 7 tahun. Penyusutan menggunakan metode garis lurus.

$$\frac{\text{Rp } 18.324.200.451}{7} = \text{Rp } 2.617.742.921$$

Maka jurnal pada saat pembelian peralatan dan mesin sebagai berikut :

Peralatan dan mesin	Rp 18.324.200.451
Kas	Rp 18.324.200.451

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jurnal penyesuaiannya yaitu sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 2.617.742.921
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 2.617.742.921

b. Gedung dan Bangunan

Nilai asset tetap Gedung dan bangunan pada laporan posisi keuangan tahun 2018 adalah sebesar Rp 16.216.830.746, ditaksir masa manfaat Gedung dan Bangunan tersebut 20 tahun tanpa nilai residu. Penyusutan menggunakan metode garis lurus.

$$\frac{\text{Rp } 16.216.830.746}{20} = \text{Rp } 810.841.537,3$$

Jurnal pada saat pembelian Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	Rp 16.216.830.746
Kas	Rp 16.216.830.746

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jurnal penyesuaiannya yaitu sebagai berikut:

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 810.841.537,3
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 810.841.537,3

4.2.4 Penyajian Laporan Keuangan

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau pada dasarnya telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Informasi tersebut berguna untuk menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menilai kinerja pemerintah dalam mengalokasikan dana/anggaran yang telah diberikan.

Laporan Realisasi Anggaran (lampiran 2) pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mencakup unsur-unsur yang terdiri dari pendapatan-LRA yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disajikan sebesar Rp 114.827.000, sedangkan Belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang disajikan sebesar Rp28.305.553.000. Dalam penyusunan laporan keuangan

khususnya Laporan Realisasi Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih, dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau belum menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih seharusnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih agar kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya bisa dibandingkan.

c. Neraca

Penyajian neraca pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dimulai dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. Penyajian laporan posisi keuangan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menggunakan format yang berbentuk staffel yaitu bentuk susunannya berurutan dari atas kebawah.

Neraca pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tahun 2018 mencakup unsur-unsur yang terdiri dari aset lancar yang terdiri atas Belanja dibayar dimuka sebesar Rp 62.666.661, piutang bukan pajak sebesar Rp 2.888.604, penyisihan piutang tak tertagih sebesar (14.443), dan persediaan sebesar Rp 56.799.366. Sedangkan aset tetap terdiri atas tanah sebesar Rp 103.218.330.000,

peralatan dan mesin sebesar Rp 47.711.776.192, gedung dan bangunan sebesar Rp 16.321.084.746, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 1.066.290.600, aset Tetap Lainnya sebesar 159.198.500, Akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp (41.292.335.101). untuk penyusutan aset tetap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menggunakan metode garis lurus. Kemudian asset lainnya yang terdiri atas asset tidak berwujud sebesar Rp 42.150.000, asset lain-lain sebesar Rp 4.041.069.255, akumulasi penyusutan dan amortisasi asset lainnya sebesar Rp (3.722.790.479). Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek (utang kepada pihak ketiga) sebesar Rp 32.839.092. Ekuitas terdiri dari ekuitas sebesar Rp 127.634.274.809.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas (lampiran 3) pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menyajikan pos-pos sebagai berikut : a) ekuitas awal, b) surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan, c) koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, d) koreksi nilai aset tetap non revaluasi, e) kenaikan/penurunan ekuitas, f) ekuitas akhir.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riauselaku instansi pemerintah telah membuat Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah.

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban operasional, surplus/defisit non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

f. Laporan Arus Kas

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau belum membuat dan menyajikan laporan arus kas, seharusnya laporan arus kas disajikan dan dilaporkan diakhir periode akuntansi. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang serta berguna untuk menilai taksiran arus kas pada tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran, Neraca, laporan Perubahan ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan hal-hal dibawah ini :

1. Mengungkapkan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.

3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

5.1 Kesimpulan

1. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau belum membuat jurnal finansial dan jurnal anggaran, semua transaksi yang terjadi hanya dicatat pada Buku Kas Umum.
2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau tidak membuat jurnal umum.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2 Saran

1. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau sebaiknya membuat jurnal finansial dan jurnal anggaran untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi.
2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau sebaiknya membuat jurnal umum kas agar penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu dapat dipertanggungjawabkan dan tersusun dengan baik.

3. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau dalam mengelola akuntansi keuangan seharusnya berpedoman secara penuh pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, 2010. *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2011. *Teori Akuntansi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul dan Kusufi Muhammad Syam, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat, Jakarta.
- Hutajulu Melpa Kristina, 2015. “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Lingkungan hidup Provinsi Riau”.Skripsi Universitas Islam Riau.
- Mirawati, 2017. “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan”.Skripsi Universitas Islam Riau.
- Roza Eli, 2017. “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu”.Skripsi Universitas Islam Riau.
- Sarmolina Tiki, 2015. “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Indragiri Hulu”.Skripsi Universitas Islam Riau.
- Subandi, 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Yolandha Agusta, 2016. “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Rokan Hulu”.Skripsi Universitas Islam Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan.





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau